PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pakhry Nugroho Kadari¹ Puput oktavia² Zaiful Zaenal³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Pare-Pare, pakhrynugroho@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Pare-Pare, puputoktavia311099@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Pare-Pare, Sepulzainal09@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to described and analyse rules of international law with respect to protection against ethnic rohingya, and find out and analyse the efforts that can be made in resolving the cases of severe Human rights violations against the ethnic rohingya in Myanmar based on international law. The Research is conducted through normative. The materials used are the primary, secondary, and tertiary studies of librarianship. It is found that Myanmar government has committed international wrongfull act by neglecting its international obligations in protecting international community's interest toward international peace and security. For such human rights violation, Myanmar has an obligation to resolve it under article 33 of the UN Charter throught diplomacy before bringing to judicial institution. The diplomacy can be done through mediation system and if it fails, then such violation can be brought before the ICC (International Criminal Court) and should be sentenced based on international law.

Keywords : *The settlement of the case, gross violation of human rights, ethnic Minorities*

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2015, berbagai media Indonesia dan Internasional diramaikan oleh pemberitaan tentang pengungsi Rohingya dengan kondisi memprihatinkan. Di Indonesia misalnya, mereka dibantu oleh masyarakat Aceh, yang akhirnya mendorong pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk juga memberikan pertolongan. Berbagai kegiatan solidaritas pun dilakukan untuk membantu mereka. Seminar dan penggalangan dana menjadi wujud solidaritas terhadap penderitaan masyarakat Rohingya diadakan. Meskipun relatif “terlambat” mengingat isu ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, tetapi upaya pertolongan terhadap para pengungsi Rohingya ini perlu mendapatkan apresiasi yang baik. Bahkan,

konflik Rohingya telah menyebabkan sekitar 43 persen penduduknya menjadi pengungsi, dan lebih dari 87 persen dari mereka kekurangan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Yang jelas, konflik ini telah menjadi tragedi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan dunia yang punya implikasi terhadap kawasan ASEAN.

Dari beberapa Negara tetangga juga mendapatkan dampak langsung dan tidak langsung dari peristiwa ini. Hal ini terutama berkaitan dengan isu keamanan yang berkaitan dengan para pengungsi Rohingya yang memasuki beberapa Negara tetangga dalam upaya mencari keamanan dari tekanan rezim pemerintahan Myanmar. Akibatnya isu ini pun berkembang menjadi isu kawasan, dimana ASEAN sebagai lembaga yang cukup perhatian dengan isu kemanusiaan tidak bisa berlepas tangan (Kaewjullakarn and Kovudhikulrungsri, 2015). Apalagi sejauh ini meskipun masih mempunyai kekuatan yang terbatas, ASEAN sudah mempunyai lembaga yang bernama *the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*. (Gonda Yumitro, : Jurna Sospol :

Seiring dengan perkembangannya kejadian yang terjadi, salah satunya di negara Myanmar. Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Etnis rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Presiden Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan dalam forum internasional, bahwa "*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*", Presiden Thien Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (*United Nations High Comissioner for Refugee*) atau ditampung di negara ketiga.

Konflik yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya tersebut dibiarkan oleh pemerintah Myanmar untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar mengusir etnis Rohingya dari negara Myanmar. Masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu masalah yang sangat serius di dunia ini, karena bukan hanya berdampak negatif bagi masyarakat yang berada di wilayah Myanmar saja tetapi berdampak pula pada Negara yang lain. Selain itu, pelanggaran HAM berat ini bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, perlu perlakuan serius dalam menangani masalah ini¹.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data sebagai bahan analisa dilakukan dengan cara studi pustaka. Beberapa sumber yang digunakan berasal dari buku, jurnal, dan beberapa dokumen penting lainnya yang terkait dengan isu pengungsi rohingya.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Persoalan Etnis Rohingya di Myanmar

Permasalahan hak asasi manusia masih menjadi wacana sensitif di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN. Kondisi ini menunjukkan sebuah ironi yang mana negara-negara anggota ASEAN memulai kesepakatan untuk mempromosikan dan menghargai HAM seperti yang tertuang dalam Piagam ASEAN maupun Deklarasi HAM secara Internasional².

Pendirian komisi HAM ASEAN (AICHR) dan deklarasi HAM ASEAN (AHRD) sebagai bentuk kemajuan norma ham di ASEAN. Salah satu pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga hari ini adalah

¹ *Ibid*

² Novie Lucky Andriyani (dalam <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/pelanggaran-hak-asasi-manusia-di-asean-studi-kasus-etnis-rohingya/>)

persoalan Etnis Rohingya. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional.³ Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.

Permasalahan Etnis Rohingya tidak hanya sebatas tentang konflik komunal, namun agama, penindasan politik dan kemiskinan. Bahkan persoalan pun meluas tidak hanya sebatas dalam domestik negara namun juga regional. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pelanggaran HAM, baik yang termasuk katagori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Berbagai instrumen hukum HAM internasional secara tegas mencantumkan kewajiban negara guna menghukum pelaku kejahatan terhadap integritas fisik seseorang. Penafsiran resmi dari berbagai badan internasional dan regional, maupun pendapat dari kalangan pakar terkemuka mengenai instrumen-instrumen tersebut secara berulang-ulang menekankan betapa pentingnya proses pengadilan dan penghukuman terhadap pelaku atas tindak pelanggaran berat HAM yang telah dilakukan.

Perserikatan bangsa-bangsa merupakan pelopor dalam mengkapanyekan hakasasi manusia . Kemudian terdapat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan tahun 1966, dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966.

Perjanjian Internasional tentang Diskriminasi Rasial, Perjanjian tentang Pemusnahan Suatu Bangsa dan Perjanjian Internasional tentang

³ Ibid

Hak-hak Anak. Jika pemerintahan Myanmar dianggap tidak melakukan langkah-langkah yang cukup dalam penyelesaian peristiwa di negaranya, komunitas internasional (dalam hal ini PBB), dapat mengambil langkah-langkah yang efektif guna menyelesaikan peristiwa yang terindikasi sebagai pelanggaran HAM berat tersebut.⁴ Dalam ASEAN terdapat perjanjian internasional yaitu Piagam ASEAN yang dalam hal ini merupakan bentuk dari Pengakuan HAM dalam tatanan internasional.

1. Pandangan HAM dan Hukum Internasional dalam Kasus Rohingya

Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Etnis rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Presiden Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan dalam forum internasional, bahwa “Rohingya are not our people and we have no duty to protect them”, Presiden Thien Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) atau ditampung di negara ketiga. Selain itu, Presiden Thein Sein menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai “a threat to national security”. Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Thein Sein berdampak buruk bagi etnis rohingya yang tidak hanya berasal dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat Myanmar.”Etnis Rohingnya mengungsi ke Thailand dan kemudian diusir pula. Padahal dalam DUHAM pada The article 14 of the Universal

⁴<https://www.coursehero.com/file/92265237/CRITICAL-REVIEW-MENGENAI-KASUS-PELANGGARAN-HAM-ETNIS-ROHINGYAdocx/>

Declaration of Human Rights, menyatakan bahwa (Yordan, 2013:165)⁵

Peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya telah menggugah rasa kemanusiaan banyak pihak. Tidak diakuinya etnis Rohingya ke dalam bagian daftar etnis yang berada di negeri Myanmar tersebut, merupakan upaya peniadaan terhadap HAM warga negara yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah negara tersebut. Tindakan itu bahkan ditindaklanjuti dengan tidak diberikannya status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Bahkan, upaya penghapusan identitas dengan tidak mengakui nama 'Rohingya', oleh pemerintahan Myanmar, dapat dikategorikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu. Tindakan yang lebih mencemaskan adalah, adanya dugaan konfrontasi fisik berupa operasi militer yang diduga menewaskan ratusan masyarakat sipil tak berdosa. Tindakan konfrontasi fisik yang terjadi, telah menjadi pemicu terjadinya gelombang pengungsi etnis Rohingya ke beberapa negara⁶

Bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu lecutan untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa, Myanmar sebagai sebuah negara tentu memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi. Ia tidak dapat mengesampingkan hukum Internasional yang telah diakui, diadopsi, dan dipraktikkan di berbagai negara.⁷

⁵ Y Gunawan, *BURMA'S ROHINGYA CASE IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*. JURNAL MEDIA HUKUM. VOL. 20 NO.1 JUNI 2013. Diakses pada laman <http://journal.umsida.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1411/1455> tanggal 03 Juni 2021 jam 15.37 WIB

⁶ *Ibid*

⁷ <https://123dok.com/title/tanggung-negara-kerugian-wisatawan-berkaitan-pelanggaran-berwisata-manusia>

Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar ialah dengan menggunakan Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya.” Mengenai kasus yang terjadi pada etnis rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar). “Serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian.” “Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). (Simon, 2009:31)⁸”

Setelah mengecam Myanmar, PBB membentuk tim Misi Pencari Fakta Internasional PBB terkait Myanmar (*Independent International Fact Finding Mission*) pada bulan Agustus 2018 menyatakan taktik militer "sangat tidak sepadan dengan ancaman keamanan yang ada" dan "keperluan militer tidak pernah dapat menjadi pembenaran bagi pembunuhan tanpa pandang bulu, perkosaan berkelompok terhadap perempuan, penyerangan pada anak-anak dan pembakaran keseluruhan desa". Myanmar menolak laporan tersebut, dengan menyatakan bahwa

⁸ Simon, 2009. Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta)

operasinya selalu hanya menyasar ancaman milisi atau pemberontak.

“Titik terang atas keadilan bagi Bangsa Rohingnya adalah setelah Negara Gambia mengajukan tuntutan di ICJ atau Mahkamah Internasional di Den Haag pada hari Senin , 11 November 2019 atas Kekejaman yang dilakukan Myanmar kepada Suku Rohingnya. Negara yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut mendapatkan dukungan dari 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam dan tim pengacara internasional. Gambia dan Myanmar menandatangani Konvensi Genosida 1948, yang mengharuskan negara-negara ini mencegah dan menghukum kejahatan genosida. Gambia mendesak mahkamah untuk mengeluarkan sebuah keputusan guna memastikan Myanmar segera” ”menghentikan kekejaman dan genosida terhadap warga Rohingnya-nya sendiri.””

Tuntutan tersebut dipimpin oleh “Abubacarr M Tambadou, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Gambia. Dia sebelumnya bekerja di ICC untuk Rwanda guna menyelidiki genosida pada tahun 1994. Tambadou mengatakan bahwa dirinya terdorong untuk bertindak setelah mendengar sejumlah cerita pembunuhan kejam, perkosaan dan penyiksaan dari korban selamat saat dirinya mengunjungi kamp pengungsi Rohingnya di Bangladesh.”Tuntutan itu memperhatikan juga empat yurisdiksi pada ICC yaitu : (Parthiana, 2015:33)⁹”

D. Penutup

Para penduduk muslim Rohingnya tidak diakui sebagai warga Negara di Myanmar, demikian juga di luar negeri, mereka menjadi masyarakat yang kehilangan identitas kewarganegaraannya.

⁹ Parthiana, Wayan. 2015. Hukum Pidana Internasional. Bandung : CV. Yrama Widya. Diakses pada tanggal 03 Juni 2021 jam 09.31 WIB

Referensi

Murdiyatmoko, Janu, 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* ,
Grafindo Media Pratama, Jakarta,

Simon, 2009. *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional* , *Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta,

Wijayati, Herlin, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* , Bayu Media,
Malang,

Peraturan Perundang-Undang

*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities* 1992

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
1965

Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan
1961

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia